

# KONSEP AGAMA DAN NEGARA DALAM PANDANGAN MOHAMMAD NATSIR

M. Sulaeman Jajuli

Dosen Tetap Prodi Al Ahwal Asy Syakhshiyah, STAI Al Hidayah, Bogor

## 1. Pendahuluan

Polemik hubungan agama dan Negara masih menjadi perdebatan yang terus berlanjut dan tidak akan tuntas dibanyak negeri Muslim sampai saat ini. Apakah agama menjadi wilayah privat individu warga Negara ataukah masuk dalam wilayah yang harus diatur oleh Negara?, bagaimana mengurai dan menjelaskan hubungan agama dan Negara juga menjadi persoalan yang belum menemukan solusi atau jawaban yang dapat dijadikan pedoman bersama.

Diantara persoalan itu adalah tidak adanya konsep yang baku cara bernegara dalam agama-agama, termasuk Islam. Yang lainnya adalah telah terbentuknya pencitraan buruk di tengah-tengah masyarakat akan kekerasan yang dilakukan oleh agama ketika berkuasa. Ataupun agama hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan Negara untuk dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan.

Sebelum pembahasan lebih jauh mengenai konsep agama dan negara dalam perspektif M. Natsir, dalam hal ini maka terlebih dahulu kita diketahui apa yang dimaksud dengan "agama" dan apa yang dimaksud dengan "negara" serta bagaimana kedudukan negara dalam Islam. Dalam makalah yang singkat ini pembahasan utama pandangan M. Nasir mengenai agama dan Negara, merupakan

bentuk sanggahan-sanggahan yang dilakukannya antara M. Nasir dengan Ir. Soekarno sebagai Presiden RI pertama.

## 2. Pengertian Agama dan Negara

### a. Agama

Agama berasal dari bahasa sangsekerta yang berarti tradisi, tidak bergerak, peraturan menurut konsep *Veda*. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut<sup>1</sup>.

Agama dalam bahasa arab ialah *din*, yang bermakna: ta'at, takut dan setia, paksaan, tekanan, penghambaan, perendahan diri, pemerintahan, kekuasaan, siasat, balasan, adat, pengalaman hidup, perhitungan amal. Sinonim kata *din* dalam bahasa arab ialah *millah*. Bedanya, *milah* lebih memberikan titik berat pada ketetapan, aturan, hukum, tata tertib, atau doktrin dari *din* itu<sup>2</sup>.

Kalimat *din* yang diartikan agama tertulis dalam al-Qur'an Surat alu-Imron:

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1997. hlm. 10

<sup>2</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Agama> diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2012

إن الدين عند الله الإسلام

Artinya: “*Sesungguhnya Agama yang ada disisi Allah agama Islam*”

Adapun yang berkaitan dengan *millah*, firman Allah swt dalam Qur’an:

فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا

Artinya: “*Maka ikutilah millah Ibrahim yang lurus dan benar*”

Kalimat *din* bergandengan dengan kalimat *millah* terdapat dalam Qur’an yang berbunyi:

وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم

إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

Artinya: “*Dan tidaklah dijadikan agama ini membawa kesulitan, tetapi mengikuti millahnya Ibrahim yang suci, lurus dan ia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik*”

Dalam makna lain *din* didefinisikan sebagai agama, pada umumnya merupakan suatu sistema credo ‘tata keimanan’ atau ‘tata keyakinan’ atas adanya suatu yang mutlak diluar manusia. Selain itu ia juga merupakan sistema ritus ‘tata peribadahan’ manusia kepada sesuatu yang dianggap Yang Mutlak, juga sebagai sistem norma ‘tata kaidah’ yang mengatur hubungan antar manusia serta manusia dengan alam lainnya sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadahan itu.<sup>3</sup>

Sebagai seorang muslim, ia menyatakan bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna dan kesempurnaannya telah dijelaskan dan difirmankan Allah swt. Kesempurnaan Islam akan lebih sempurna dengan

kemandirian pribadi muslim dalam beragama, hal itu sebagaimana dinyatakan Abdurahman Misno dalam bukunya “*Menjadi Muslim Mandiri*” bahwa Islam adalah agama yang mudah, ia dapat diamalkan oleh seluruh umat manusia sehingga kemandirian beragamapun akan mudah dilakukan dan dengan cara-cara yang disesuaikan dengan kadar intelektualitas masing-masing. Adapun beberapa panduan yang bisa dilakukan adalah dengan cara-cara yang telah diajarkan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wa Salam* dan para shahabatnya. Di antara cara tersebut adalah :

Pertama, *mentadaburi* ayat-ayat *qauliyah*, yaitu membaca seluruh wahyu yang turun kepada para utusanNya, dengan pemahaman yang benar. "membaca" di sini tidak hanya kegiatan menyusun makna dari barisan-barisan huruf, kata, kalimat dan paragraf. Membaca berarti memahami, menyelami maknanya dan meraih manfaat darinya.

Kedua, *mentadabburi* ayat-ayat *kauniyyah*, yaitu menyaksikan segala tanda kebesaran Allah yang ada di penjuru alam raya ini, dari debu yang tidak tampak oleh pandangan mata, hingga sistem tata surya yang maha luas di angkasa raya. Semua itu menunjukkan bahwa Allahlah sang pencipta dan yang berhak untuk diibadahi. Dari mentadaburi dan mentafakuri ayat-ayat *qauliyah* dan ayat-ayat *kauniyyah* inilah akan terpatri sebuah kesadaran beragama.

Dua kegiatan ini pula yang telah banyak mengantarkan kaum intelektual kafir menemukan kebenaran dan kemudian masuk Islam. Mereka telah mentadaburi dan mentafakuri ayat-ayat *qauliyah* dan ayat-ayat *kauniyyah*nya, sehingga mereka

<sup>3</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Tentang Paradigma dan Sistem Islam*, (Jakarta; GIP, 2004). hlm. 30

mendapatkan hidayah Islam. Inilah mandiri dalam beragama.<sup>4</sup>

### b. Negara

Definisi negara dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa negara adalah suatu kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.<sup>5</sup>

Adapun pengertian Negara menurut para ahli antara lain:

- Georg Jellinek: *Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.*
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel: *Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal*
- Prof. Mr. Soenarko: *Negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.*
- Aristoteles: *Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama<sup>6</sup>.*

<sup>4</sup> Abdurahman Misno, *Menjadi Muslim Mandiri*, (Jakarta, Amzah, 2010), hlm. 25

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 685

<sup>6</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Negara> diakses terakhir 10 Okt 2009

### 3. Hubungan Agama dan Negara dalam Sejarah Nabi SAW

Untuk mengetahui hubungan agama dan Negara pada masa Rasulullah saw, maka kita harus melihatnya pada proses pembentukan Negara yang dilakukan oleh Rasulullah di kota Madinah pada awal tahun Hijrah. Dimana beliau menjadikan agama sebagai dasar pembinaan masyarakat Madinah yang nantinya akan membentuk sebuah Negara Islam yang pertama.

Diketahui bersama bahwa ketika Rasulullah saw tiba di kota Madinah, maka bertemulah beberapa unsur kelompok masyarakat yang berbeda<sup>7</sup>, yang merupakan kewajiban sekaligus tantangan bagi beliau untuk membentuknya menjadi sebuah masyarakat yang bermartabat, dibangun di atas pondasi yang kokoh, dan memiliki tata aturan yang mengatur tingkah laku dan cara pergaulan diantara mereka (tatan masyarakat seperti ini, dikenal sekarang sebagai sebuah Negara).

Pembentukan Negara atau masyarakat dalam Islam untuk pertama kalinya, dikerjakan sendiri oleh Rasulullah saw. Dengan demikian beliau memberi pelajaran bagaimana seharusnya Negara atau masyarakat Islam itu terbentuk, Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah yang heterogen itu,

<sup>7</sup> Setidaknya ada tiga golongan besar, yaitu: a) Golongan Anshar, terdiri dari beberapa kabilah yang sebelumnya saling bermusuhan. b). Golongan Yahudi, terkenal dengan kelicikannya baik dalam perdagangan maupun membuat provokasi-provokasi yang tidak jarang menyebabkan terjadinya perang saudara. c). Golongan Muhajirin, yang datang dari Makkah tanpa membawa apa-apa, sehingga sangat membutuhkan pertolongan. Lihat Ahmad Shalaby, *Masyarakat Islam*, Jogyakarta: tanpa penerbit, 1957. Hlm. 38

menjadi satu keluarga besar yang memperhatikan seluruh anggota masyarakatnya tanpa memandang asal suku dan kabilahnya. Itulah keluarga Islam "masyarakat atau negara Islam". Hal itu semua didasari dalam penjelasan al-Qur'an surat al-Anfal:

والف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض  
جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف  
بينهم إنه عزيز حكيم

Artinya: “Dan Dia (Allah) yang mempersatukan hati mereka (orang yang beriman) walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

Ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah dalam membentuk Negara, komunitas atau masyarakat Islam itu:

1. Pembinaan Masyarakat Melalui Masjid  
Sesampainya di Madinah, Rasulullah saw segera menegakkan masyarakat Islam yang kokoh dan terpadu, dan sebagai langkah pertama kearah itu, Rasulullah saw membangun masjid.<sup>8</sup> Tidaklah heran kalau masjid merupakan asas utama dan terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam, karena masyarakat Islam tidak akan terbentuk kokoh dan rapi kecuali dengan

adanya komitmen terhadap sistem, aqidah dan tatanan Islam, hal ini hanya bisa ditumbuhkan melalui semangat masjid.<sup>9</sup>

Di dalam masyarakat Islam masjid berkedudukan sebagai pusat pembinaan mental spiritual dan phisik material, tempat berhubungan dengan Tuhan sepanjang zaman, yang akan melahirkan hubungan yang kokoh antara hamba dengan Tuhannya dan akan menjadi sumber kekuatan individu-individu Muslim. Bagaimana tidak kaum muslimin diwajibkan melakukan kejama'ahan shalat fardu yang lima di masjid-masjid, dan shalat jum'at berjama'ah setiap minggu. Kejam'ahan shalat di masjid inilah yang akan membentuk jama'ah (masyarakat) Islam yang solid, menjadi kultur (adat istiadat) perkampungan kaum muslimin, sehingga terwujud masyarakat yang "la khaufun 'alaih walahum yahzanun"<sup>10</sup>

Masjid itu bukan sekedar tempat untuk melaksanakan shalat semata, tetapi juga menjadi sekolah bagi orang-orang Muslim untuk menerima pengajaran dan bimbingan-bimbingan Islam, sebagai balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan berbagai unsur kekabilahan dan sisa-sisa pengaruh perselisihan semasa Jahiliyah, sebagai tempat untuk mengatur segala urusan dan sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> Masjid Nabawi dibangun diatas tempat menderumnya onta beliau, milik dua anak yatim yang kemudian ditebus oleh Rasulullah. Dalam pembangunan masjid tersebut Rasulullah terjun langsung bersama kaum Muslimin sambil memberi semangat kepada mereka dengan bersya'ir. Lihat Syaikh Shafiyyur Rahman Al-Mubarakfury, *Ar-Rahiqul Maktum, Bahtsun Fis-Sirah An-Nabawiyah Ala Shahibiha Afdhalish-Shalati Was-Salam*, (Beirut: Muassasah Arrisalah, 1999). hlm. 184

<sup>9</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), hlm. 171

<sup>10</sup> HM Shalahuddin Sanusi, *Pembangunan Masyarakat Masjid; Format Pembangunan Berparadigma Surgawi*, Sukabumi: Lembaga Pembinaan 'Imaratul Masajid, 2003. hlm. 110

<sup>11</sup> Syaikh Shafiyyur Rahman Al-Mubarakfury, *Ar-Rahiqul Maktum, Bahtsun Fis-Sirah An-Nabawiyah*

Kemudian diantara sistem dan prinsip islam adalah tersebarnya *mahabbah* dan *ukhuwah* sesama kaum muslimin, tetapi ikatan ini tidak akan terjadi kecuali dalam masjid, dengan bertemunya kaum muslimin berkali-kali dalam sehari di mana kedudukan, kekayaan dan status sosial lainnya terhapuskan. Dan juga sistem Islam adalah terpadunya beraneka ragam latar belakang kaum muslimin dalam satu kesatuan yang kokoh diikat oleh tali Allah, ini pun bisa dilakukan bila masjid-masjid telah dibangun ditengah masyarakat muslim, karena masjid adalah tempat kaum muslimin berkumpul mempelajari ajaran islam<sup>12</sup>.

## 2. Pembinaan Melalui Mempersaudarakan Sesama Kaum Muslimin

Sebagai langkah selanjutnya, Rasulullah mempersaudarakan para sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Anshar<sup>13</sup>. Sebab masyarakat manapun, tidak akan berdiri tegak, kokoh tanpa adanya kesatuan dan dukungan anggota masyarakatnya. Sedangkan dukungan dan kesatuan tidak akan lahir tanpa adanya persaudaraan dan saling mencintai. Suatu

masyarakat yang tidak disatukan oleh tali ikatan kasih sayang dan persaudaraan yang sebenarnya, tidak mungkin bersatu pada satu prinsip. Persaudaraan itu harus didasari oleh aqidah yang menjadi idiologi dan faktor pemersatu. Persaudaraan antara dua orang yang berbeda aqidah adalah mimpi dan khurafat. Oleh sebab itu Rasulullah menjadikan aqidah islamiyah yang bersumber dari Allah swt. Sebagai asas persaudaraan yang menghimpun hati para sahabatnya.<sup>14</sup>

Inilah di antara buah yang dihasilkan dari perjalanan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Pelajaran yang paling berharga bagi nilai kemanusiaan dari peristiwa ini adalah pengorbanan, pembelaan, dan *itsar* (mendahulukan kepentingan orang lain).dasar dari persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah ini tidak memandang perbedaan suku, ras, dan status social. Rasulullah memandang sama mereka yang merupakan bangsa Arab maupun non-Arab. Antara orang yang bebas dan seorang budak. Antara seorang tokoh pada suatu kabilah dengan orang biasa. Dan antara orang kaya dan miskin.<sup>15</sup>

Persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah diantara kaum muslimin tersebut tidak hanya antara Muhajirin dan Anshar saja, tetapi lebih luas dari itu, yakni dilakukan antara sesama orang-orang Muhajirin, dan sesama orang-orang Anshar. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah dengan maksud merekatkan hubungan antara kabilah-kabilah kaum Muhajirin dan lebih khusus merekatkan hubungan suku

*Ala Shahibiha Afthalish-Shalati Was-Salam*, hlm. 185

<sup>12</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Sirah Nabawiyah*, hlm. 171

<sup>13</sup> Ibnu Ishak berkata: di antara yang dipersaudarakan adalah Abu Bakar ash-Shiddiq dengan Kharijah bin Zuhair, Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, Ammar bin Yasir denganhudzaifah bin Yaman, Abu Dzar dengan al-Munzir bin Amr, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Haritsah, Bilal bin Raba dengan Abu Ruwaihah Abdullah bin Abdurrahman al-Khats'ami dan sahabat-sahabat lainnya yang mencapai 90 orang. Lihat Ahzami Samiun Jazuli, *Hijra dalam Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006. hlm. 262

<sup>14</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Rabbani Press, 2001, hal. 176-177

<sup>15</sup> Ahzami Samiun Jazuli, *Hijra dalam Pandangan Al-Qur'an*, hlm.261-262

Aus dan suku Khazraj yang sering berperang sebelum kedatangan Rasulullah ke Madinah. Menurut Imam Abdur Rahman al-Khats'ami dalam kitabnya *Ar-Raudhul Unuf* menyebutkan: "maksud dari persaudaraan ini adalah untuk menghilangkan kesepian lantaran meninggalkan kampung halaman mereka, dan menghibur karena berpisah dengan keluarga, disamping agar mereka saling membantu satu sama lain"<sup>16</sup>.

Praktek persaudaraan sebagaimana penjelasan di atas, telah menghasilkan suatu 'masyarakat Islam' yang terdiri dari bermacam-macam kabilah dan unsure-unsur yang berbeda, tetapi masing-masing anggota masyarakat itu telah melupakan asal-usul keturunan dan golongannya. Mereka hanya melihat kepada ikatan Islam yang dijadikan Rasulullah sebagai ikatan persaudaraan di antara mereka<sup>17</sup>.

Untuk melihat gambaran kedekatan dan *itsar* di antara mereka. Allah SWT menggambarannya dengan indah dalam al-Qur'an, surat al-hasyr ayat 9:

والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في  
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على  
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح  
نفسه فأولئك هم المفلحون

Artinya: "Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (*Anshor*) sebelum (kedatangan) mereka (*Muhajirin*), mereka (*Anshor*) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (*Muhajirin*). dan mereka (*Anshor*)

<sup>16</sup> Ahmad Shalaby, *Masyarakat Islam*, Yogyakarta: tanpa penerbit, 1957. hlm. 41-42

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 43

*tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung."* (Q.S. *Al-Hasyr*:9)

Rasulullah menjadikan persaudaraan Muhajirin dan Anshar sebagai asas bagi prinsip-prinsip keadilan sosial yang paling baik di dunia. Prinsip-prinsip ini kemudian berkembang dan mengikat menjadi hukum-hukum dan undang-undang syari'at yang tetap, yang berbasis pada ukhuwah islamiyah.

### 3. Perjanjian Kaum Muslimin Dengan Orang-orang di Luar Islam

Setelah Rasulullah mengokohkan persatuan kaum Muslimin, dan telah berhasil memancarkan sendi-sendi masyarakat Islam yang baru, dengan menciptakan kesatuan aqidah, politik dan sistem kehidupan di antara orang-orang Muslim, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menawarkan perjanjian damai kepada golongan atau pihak di luar Islam. Perhatian beliau pada saat itu adalah bagaimana menciptakan keamanan, kebahagiaan dan kebaikan bagi semua manusia, mengatur kehidupan di daerah itu dalam satu kesepakatan<sup>18</sup>.

Secara garis besar perjanjian antara Rasulullah dengan golongan di luar Islam yang kemudian dikenal dengan nama

<sup>18</sup> Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfury, *Ar-Rahiqul Maktum, Bahtsun Fis-Sirah An-Nabawiyah Ala Shahibiha Afdhalish-Shalati Was-Salam*, hlm. 192

Piagam Madinah, dapat disebutkan empat prinsip hukum yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Pada pasal pertama disebutkan bahwa Islam adalah satu-satunya faktor yang dapat menghimpun kesatuan kaum muslimin dan menjadikan mereka satu ummat. Semua perbedaan akan sirna di dalam kerangka kesatuan yang integral ini. Ini merupakan asas pertama yang harus diwujudkan untuk menegakkan masyarakat Islam yang kokoh dan kuat.
2. Pada pasal kedua dan ketiga disebutkan bahwa di antara ciri khas terpenting dari masyarakat Islam ialah, tumbuhnya nilai solidaritas serta jiwa senasib dan sepenanggungan antar kaum Muslimin. Setiap orang bertanggungjawab kepada yang lainnya baik dalam urusan dunia maupun akhirat.
3. Pada pasal keenam disebutkan betapa dalamnya asas persamaan sesama kaum muslimin. Ia bukan hanya slogan, tetapi merupakan salah satu rukun syari'at yang terpenting bagi masyarakat Islam yang harus diterapkan secara detil dan sempurna. Ini berarti bahwa jaminan seorang Muslim, siapapun orangnya, harus dihormati dan tidak boleh diremehkan.
4. Pada pasal kesebelas disebutkan bahwa hakim yang adil bagi kaum Muslimin, dalam segala perselisihan dan urusan mereka, hanyalah syari'at dan hukum Allah swt yaitu apa yang terkandung di dalam kitab Allah swt dan sunnah Rasul-Nya. Jika mereka mencari penyelesaian bagi problematika mereka kepada selain sumber ini maka mereka berdosa dan

terancam kesengsaraan di dunia dan siksa Allah swt di akhirat<sup>19</sup>.

*Dutsur* yang dibuat oleh Rasulullah saw ini, berdasarkan wahyu Allah swt dan ditulis para sahabatnya kemudian dijadikan undang-undang dasar yang disepakati kaum muslimin dan tetangganya yaitu Yahudi dan Arab Badui yang belum masuk Islam, merupakan bukti nyata bahwa masyarakat Islam sejak awal pertumbuhannya tegak berdasarkan undang-undang yang sempurna, bahwa masyarakat Islam sejak awal telah ditopang oleh perangkat perundang-undangan dan manajemen yang diperlukan setiap masyarakat atau negara. Dari sini tertolaklah tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Islam hanya mengataur hubungan manusia dengan Rabbnya<sup>20</sup>.

Dengan terjalannya perjanjian ini maka keamanan, ketentraman dalam merealisasikan ibadah kepada Allah dapat terwujud. Sesungguhnya dengan perjanjian ini maka orang-orang Yahudi tidak memiliki celah untuk mengadu domba kaum Muslimn ataupun masyarakat Madinah secara umum, sebab sudah tabiat Yahudi untuk selalu mengadu domba, serta kita sudah maklumi bahwa penyebab terjadinya peperangan yang berkepanjangan antara suku Aus dan suku Khazraj di Madinah adalah orang-orang Yahudi.

Terbentuknya masyarakat Islam pertama di bawah bimbingan Rasulullah saw dengan segala perangkatnya, mulai dari tata aturan pergaulan hingga perundang-undangan yang diberlakukan dalam

<sup>19</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Sirah Nabawiyah*, hlm. 182-184

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 181

kehidupan bermasyarakat, maka dapatlah dikatakan bahwa masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah saw di Madinah adalah konsep masyarakat atau Negara modern pertama di dunia. sebab unsur-unsur untuk terbentuknya sebuah Negara sudah terpenuhi pada masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah saw di Madinah<sup>21</sup>.

## 5. M. Natsir Tentang Hubungan Agama dan Negara

### a. Riwayat Hidup M. Natsir

M. Natsir seorang anak yang cerdas dan berbakat. Sejak kecil ia selalu membantu orang tuanya dan hidup dalam kemiskinan. Ia lahir di Jembatan Berukir Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tanggal 17 Juli 1908 dengan seorang Ibu bernama Khadijah dan Bapak Muhammad Idris. M. Natsir memiliki gelar Datuk Sinaro Panjang.<sup>22</sup> M. Natsir mempunyai tiga orang saudara kandung yaitu Yukinan, Rubiah dan Yohanusun.<sup>23</sup> di tempat kelahirannya itulah M. Natsir mempelajari banyak ilmu-ilmu keagamaan dan intelektualnya yang pertama. Ia menempuh Pendidikan dasar di sekolah Belanda dan mempelajari agama dengan rajin kepada para ulama. Ketika ia berumur 18 th, ia berharap dapat sekolah di Sekolah Rendah Belanda (HIS), namun harapannya tidak tercapai karena ia

sebagai anak yang orang tuanya bekerja rendah. Maka ia pun sekolah di Partikeler HIS adabiah di Padang. Setelah selesai studi, ia dipindahkan ke HIS Pemerintah di Solok oleh ayahnya. Karena kepintaran dan kecerdasan yang dimiliki Natsir, ia dipindahkan sekolahnya di OI dan ia belajar bahasa Arab, Hukum fikih kepada Tuanku Mudo Amin dan sorenya ia belajar di Madrasah Diniyah dan mengaji al-Qur'an pada malam harinya.<sup>24</sup>

Disamping belajar, M. Natsir juga mengajar dan menjadi guru bantu kelas I di sekolah yang sama. M. Natsir kemudian melanjutkan studinya MULO di Padang dan aktif mengikuti kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler diantaranya adalah ia sebagai anggota Pandu Nationale Islamietische Pavinderij (seperti Pramuka), dari organisasi inilah M. Natsir mendapatkan kesadaran hidup bermasyarakat. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan formalnya ke *Algememe Midelbare School* (AMS) di Bandung dan di sekolah inilah M. Natsir bertemu A Hasan sebagai pendiri PERSIS. Ia belajar agama Islam secara mendalam dan berkecimpung dalam gerakan politik, dakwah dan Pendidikan.<sup>25</sup>

Sejak belajar di AMS inilah M. Natsir mulai tertarik pada pergerakan Islam dan belajar Politik di perkumpulan JIB sebuah organisasi pemuda Islam yang anggotanya adalah pelajar-pelajar bumi putera yang bersekolah di sekolah Belanda. Di usia ke 20 tahun beliau bergaul dengan tokoh-tokoh Nasional seperti Hatta,

<sup>21</sup> Dalam rumusan Konvensi Montevideo tahun 1933 disebutkan bahwa dikatakan suatu Negara bila memiliki 3 (tiga) unsur yaitu: Rakyat (masyarakat/warganegara), Wilayah tertentu dan Pemerintahan yang berdaulat. Lihat Dede Rosyada et. All, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2000. hlm. 45

<sup>22</sup> Yusuf A. Puar, *M. Natsir 70 tahun*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1978), hlm. 4

<sup>23</sup> Solihin Salam, *Wajah Nasional*, (Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam, 1990), hlm. 131.

<sup>24</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 100

<sup>25</sup> A.W Praktiknya, *Percakapan Antara Generasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak*, (Jakarta: Media Dakwah, 1989), hlm. 30-32.

Prawoto Mangunsasmito, Yusuf Wibisono, Tjokro Aminoto dan M. Roem.<sup>26</sup>

### b. Guru-guru M. Natsir

M. Natsir sebagai seorang ulama dan negarawan. Ia berdakwah dan membentuk partai yang sangat dikagumi pada masanya. Namun yang menjadikan M. Natsir menjadi seorang ahli dalam bidang agama adalah A. Hasan<sup>27</sup>. Sedangkan dari sisi politik M. Natsir banyak belajar kepada Syafruddin Prawinegara.

### c. Karya Ilmiah dan Buku-buku M Natsir

Deliar Noer mengatakan bahwa M. Natsir adalah sebagai intelektual-ulama atau ulama-intelektual. Sebagai seorang intelektual, M. Natsir melahirkan karya-karya ilmiah monumental. Karya ilmiah yang ditulis M. Natsir menyangkut masalah sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dakwah dan yang lainnya. Yusuf Abdullah Puar menyebutkan bahwa ada 52 judul yang telah ditulis M. Natsir sejak tahun 1930.<sup>28</sup>

Tulisan dalam Bahasa Indonesia yang pertama dibukukan adalah *Cultur Islam*, yang ditulisnya berdua dengan almarhum C.P. Wolf Kemal Schoemaker. Menurut penilaian Soekarno, tulisan-tulisan yang ditulis M. Natsir sangat penting sekali untuk dibaca bagi kalangan intelektual Indonesia yang pada masa itu lebih menguasai dan menghargai tulisan-tulisan dalam bahasa Belanda dari pada tulisan Bahasa Indonesia. Untuk itu

<sup>26</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme Islam dan Demokrasi, Pandangan Politik M. Natsir*, (Jurnal Islamika, Nomor 03, Januari-Maret), hlm. 65.

<sup>27</sup> A. Hasan merupakan tokoh dan pendiri adanya organisasi Islam Persatuan Islam (PERSIS).

<sup>28</sup> Yusuf Abdullah Puar, *M. Natsir 70 tahun: kenang-kenangan kehidupan dan Perjuangan*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1978), hlm. 4.

Soekarno menghargai usaha M. Natsir dengan penghargaan yang sangat tinggi.<sup>29</sup>

Pemikiran M. Natsir tentang hubungan agama dan negara ini terdapat dalam tulisan-tulisan beliau terutama yang dimuat di majalah *Panji Islam* dan *Al-Manaar*.<sup>30</sup> Sebagai tanggapan terhadap seri-artikel Ir. Soekarno<sup>31</sup>. Di antara tulisan-tulisan itu adalah:

1. *Cinta Agama dan Tanah Air*
2. *Ichwanushshafah* (Mei 1939)
3. *Rasionalisme Dalam Islam* (Juni 1939),
4. *Islam dan Akal Merdeka* (1940)
5. *Persatuan Agama dan Negara*<sup>32</sup>.

Buku-buku lain yang telah ditulis M. Natsir diantaranya adalah:

1. *Agama dan Negara, Falsafah dan Perjuangan Islam*, pokok bahasanya tentang hubungan Agama dan Negara serta upaya umat Islam dalam memperjuangkan pokok-pokok nilai Islam dalam kehidupan beragama
2. *Dari masa ke masa* (Jakarta: Fajar Shadiq, 1975). Memuat soal pribadi, batu pertama, pembinaan keluarga,

<sup>29</sup> Solichin Salam, *Berita Buana*, Selasa, 9 Februari 1933.

<sup>30</sup> *Panji Islam* adalah majalah mingguan di Padang dipimpin oleh tokoh Masyumi Zainal Abidin Ahmad. terbit tahun 1933 sampai 1942 sebanyak 2000 eksemplar dan disebar keseluruh Indonesia dan Malaya. Sedangkan mmajalah *Al-Manar* adalah majalah bulanannya. Lihat DP. Sati Alimin, *M.Natsir versus Soekarno*, (Padang: Jajasan Pendidikan Islam Padang, 1968) hlm. 7.

<sup>31</sup> M. Natsir, *Capita Selecta I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 429.

<sup>32</sup> Selain Natsir yang mengkritik tulisan-tulisan Bung Karno tersebut, ada juga A. Hasan melalui majalah *Al-Lisan*, T.M. Habi Ash-Shiddieqy menulis di majalah *Lasjkar Islam*, sedangkan H. Siradjuddin Abbas yang memimpin partai ahli tarekat Perti, menulis dalam majalah *Suarti*. Ajib Rosidi, *M. Natsir Sebuah Biografi*, Jakarta: Grimukti Pasaka, 1990. hlm. 256.

penjajah membawa kesuraman dan memupuk kemerdekaan.

Yusuf Abdullah Puar menyebutkan bahwa ada 52 judul buku yang telah ditulis M. Natsir dalam berbagai kesempatannya sejak tahun 1930.<sup>33</sup>

#### **d. Pro Kontra M. Natsir dan Soekarno tentang Agama dan Negara**

Kajian tentang M. Natsir akan selalu menarik, baik kepribadian<sup>34</sup>, sikap dan pemikirannya. Tentang pemikiran M. Natsir sudah tampak sejak ia berusia muda, ia gemar membaca buku-buku dan peka' terhadap kejadian atau peristiwa-peristiwa keummatan. Konsep agama (Islam) dan negara merupakan hasil pemikiran M. Natsir. Maka oleh sebab itu dalam pembahasan ini akan mencoba untuk menjelaskan pandangan M. Natsir mengenai konsep agama; kaitannya dengan negara, bentuk negara yang ideal, ajaran-ajaran Islam yang perlu diaplikasikan dalam Negara.<sup>35</sup>

Pembahasan yang berkaitan dengan pemikiran M. Nasir dalam hal agama dan Negara, terdapat dalam tanggapan M. Natsir terhadap tulisan Ir. Soekarno yang berjudul *"Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dan Negara"*. Dalam tulisannya, Bung Karno menyebut sekularisasi yang dijalankan Kemal Attaturk di Turki-yakni pemisahan agama dari negara-sebagai langkah *"paling modern"* dan *"paling radikal"*. Kata Bung Karno: *"Agama dijadikan urusan perorangan. Bukan Islam itu dihapuskan oleh Turki, tetapi Islam itu*

*diserahkan kepada manusia-manusia Turki sendiri, dan tidak kepada negara. Maka oleh karena itu, salahlah kita kalau mengatakan bahwa Turki adalah anti-agama, anti-Islam. Salahlah kita, kalau kita samakan Turki itu dengan, misalnya, Rusia.*" Menurut Soekarno, apa yang dilakukan Turki sama dengan yang dilakukan negara-negara Barat. Di negara-negara Barat, urusan agama diserahkan kepada individu pemeluknya, agama menjadi urusan pribadi, dan tidak dijadikan sebagai urusan negara. Jadi menurut Soekarno, untuk keselamatan dunia dan kebaikan agama-bukan untuk mematikan agama itu-urusan dunia diberikan kepada pemerintah, dan urusan agama diberikan kepada yang mengerjakan agama<sup>36</sup>.

M. Natsir mengkritik keras pandangan Soekarno tentang pemisahan agama dengan negara<sup>37</sup>. Natsir meyakini perlunya membangun negara yang diinspirasi oleh nilai-nilai Islam<sup>38</sup>. Orang Islam, kata Natsir, mempunyai falsafah hidup dan idiologi sebagaimana agama atau paham yang lain, dan falsafah serta idiologi itu dapat disimpulkan dalam satu kalimat al-Qur'an :

**وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون**

Artinya: *"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.(Q.S. Addzariyat: 56)"*<sup>39</sup>

Oleh karena itu segala aktivitas muslim untuk berbangsa dan bernegara harus ditujukan untuk pengabdian kepada Allah. Yang tentunya berbeda dengan tujuan mereka yang berpaham netral agama. Untuk itu, Tuhan memberi

<sup>33</sup> Yusuf Abdullah Puar, *M. Natsir 70 tahun* (Jakarta: Pustaka Antara, 1978), hlm. 4.

<sup>34</sup> Anwar Harjono, *Pemikiran dan perjuangan Mohammad Natsir*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm.17.

<sup>35</sup> Dwi Purwoko, *Negara Islam*, (Depok: PT. Permata Artistika Kreasi, 2001), hlm.65.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 82

<sup>37</sup> M. Natsir, *Capita Selecta 1*, hlm. 436

<sup>38</sup> Ajib Rosidi, *M. Natsir Sebuah Biografi*, hlm. 292

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 293

berbagai macam aturan mengenai hubungan dengan Tuhan dan aturan mengenai hubungan di antara sesama makhluk yang berupa kaidah-kaidah yang berkenaan dengan hak dan kewajiban. Itulah sebenarnya yang oleh orang sekarang disebut "urusan kenegaraan". Yang orang sering lupa ialah bahwa pengertian "agama" menurut Islam bukanlah hanya urusan "ibadat" saja, melainkan meliputi semua kaidah dan *hudud* dalam muamalah dalam masyarakat. Dan semuanya sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah<sup>40</sup>.

Untuk menjaga agar segala peraturan itu dilaksanakan dengan baik, diperlukan suatu kekuatan dalam pergaulan hidup berupa kekuasaan dalam negara, karena sebagaimana buku undang-undang yang lain, Al-Qur'an pun tak dapat berbuat apapun dengan sendirinya. Sebagai contoh, Islam mewajibkan agar orang Islam membayar zakat sebagaimana mestinya; bagaimana undang-undang kemasyarakatan ini mungkin berlaku dengan benar, kalau tidak ada pemerintah yang mengawasi berlakunya? Islam melarang zina, judi, minum arak yang merupakan penyakit masyarakat yang merusak sendi-sendi pergaulan hidup; bagaimana larangan itu dapat dilaksanakan kalau negara bersikap "masa bodoh" saja dengan alasan "negara netral agama"?<sup>41</sup>

Jelasnya, kata Natsir, "Bagi kita kaum Muslimin, "Negara" bukanlah suatu badan yang tersendiri yang menjadi tujuan. Dan dengan "Persatuan Agama dan Negara", bukanlah bahwa "Agama" itu cukup sekedar dimasuk-masukkan saja disana sini kepada "Negara" itu. Negara, bagi kita, bukan

tujuan, tetapi alat. Urusan kenegaraan pada pokoknya dan pada dasarnya adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan, satu "intergreered deel" dari Islam. Yang menjadi tujuan ialah: *Kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berkenaan dengan perikehidupan manusia sendiri (sebagai individu), ataupun sebagai anggota dari masyarakat.* Baik yang berkenaan dengan kehidupan dunia yang fana ini, ataupun yang berhubungan kehidupan akhiran kelak<sup>42</sup>.

Selanjutnya, M Natsir mengutarakan bahwa seringkali orang mempunyai 'logika': "Dahulu di Turki ada persatuan agama dengan negara. Buktinya ada Khalifah yang katanya juga menjadi Amirul Mukminan. Akan tetapi waktu itu Turki negeri yang mundur, tidak modern, negeri "sakit", negeri "bobrok". Sekarang di Turki, Agama sudah dipisahkan dari negara. Lihat, bagaimana majunya, bagaimana modernnya. Politik Kemal dkk berarti betul". Ketidakhahaman terhadap negara dalam Islam, negara yang menyatukan agama dan politik, pada dasarnya bersumber dari kekeliruan memahami gambaran pemerintahan Islam. "Kalau kita terangkan, bahwa agama dan negara harus bersatu, maka terbayang sudah di mata seorang yang tidak mengerti duduk di atas singgasana, dikelilingi oleh "haremnya" menonton tari "dayang-dayang". Terbayang olehnya yang duduk mengepalai "kementerian kerajaan", beberapa orang tua bangsa memegang toga. Sebab memang beginilah gambaran 'pemerintahan Islam' yang digambarkan dalam kitab-kitab Eropa yang mereka baca dan diterangkan oleh guru-guru bangsa

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 294

<sup>41</sup> M. Natsir, *Capita Selecta 1*, hlm. 438

<sup>42</sup> *Ibid*. hlm. 434

barat selama ini. Sebab umumnya (kecuali amat sedikit) bagi orang Eropa: *Chalifah* = *Harem*; Islam = poligami.” Natsir berkata bahwa bila ingin memahami agama dan negara dalam Islam secara jernih, hendaknya kita mampu menghapuskan gambaran keliru tentang negara Islam di atas. Secara implisit Natsir menilai bahwa gambaran “negara Islam” seperti inilah yang terdapat dalam pandangan Soekarno maupun Kemal<sup>43</sup>.

Ir. Soekarno berkata: “*Tidak ada ijma’ ulama tentang agama dan negara harus bersatu*”. Menanggapi pernyataan Soekarno tersebut, Natsir secara tersirat menilai Soekarno tidak objektif dalam mengemukakan pendapatnya. Sebab, di satu pihak ia menganjurkan agar umat Islam membuang “warisan tradisional” *gedachte traditie*. Tetapi, di lain pihak ia sendiri secara sadar mengutip konsep tradisional, bahwa tidak ada *ijma* tentang persatuan agama dengan negara. Natsir kemudian menyatakan, “Baik, tapi kita bertanya pula: “Mana pula *ijma’* ulama yang mengatakan bahwa agama dan negara tidak harus bersatu?” atau dikatakan “Bagaimanakah, kalau andaikata, kita beri keterangan bahwa sesungguhnya ada *ijma* ulama yang berkata begitu? Apakah Ir. Soekarno akan menerima keputusan *ijma* ulama itu, ataukah tidak? Atau nanti beliau akan berkata ‘Ya, itu cuma satu *ijma* ulama, satu *gedachte traditie*’, dan bukanlah saya sudah bilang bahwa semua ‘*gedachte traditie*’ itu harus dilempar jauh-jauh.”<sup>44</sup>

Adapun tanggapan Natsir terhadap pandangan Syaikh Ali Abdur Raziq, yang dikutip Soekarno bahwa Nabi hanyalah mendirikan agama saja dan tidak

mendirikan negara adalah bahwa eksistensi negara merupakan suatu keharusan di dunia ini, di zaman apa pun. “Memang negara tidak perlu disuruh didirikan oleh Rasulullah lagi. Dengan atau tidak dengan Islam, negara memang bisa berdiri dan memang sudah berdiri sebelum dan sesudah Islam, di mana saja ada segolongan manusia yang hidup bersama-sama dalam satu masyarakat.”<sup>45</sup>

Hanyalah yang dibawa oleh nabi Muhammad saw ialah beberapa patokan untuk mengatur negara, supaya negara itu menjadi kuat dan subur, dan boleh menjadi wasilah (sarana) yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan hidup manusia yang berhimpun dalam negara itu, untuk keselamatan diri dan masyarakat, untuk kesentosaan perseorangan dan umum. Dalam hal itu, apakah yang menjadi kepala pemerintahan menggunakan gelar *Khalifah* atau tidak, bukanlah urusan yang utama. Asal saja yang diberi kekuasaan itu sebagai *ulil-amri* kaum muslimin, sanggup bertindak dan peraturan-peraturan Islam berjalan dengan semestinya dalam susunan kenegaraan, baik dalam kaedah maupun praktek<sup>46</sup>.

Mahmud Essad Bey, menurut Ir. Soekarno pernah berkata bahwa “Apabila agama dipakai buat memerintah, ia selalu dipakai sebagai alat penghukum ditangan raja-raja, orang zalim dan orang-orang tangan besi”. M Natsir mengatakan, “Seseorang yang melemparkan tuduhan yang begitu berat, sekurang-kurangnya mempunyai kewajiban untuk menunjukkan bukti. Manakah dari ajaran-ajaran Islam yang mungkin dipakai menjadi alat oleh orang-orang yang zalim.” Tetapi kalau dikatakan bahwa orang yang zalim dan jahat

<sup>43</sup> Ajib Rosidi, *M. Natsir Sebuah Biografi*, hlm. 305

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 445 *Ibid.* hlm. 452

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 452

<sup>46</sup> Dwi Purwoko, *Negara Islam*, hlm. 91

seringkali memakai agama sebagai kedok, itu memang tak usah dibantah lagi. Orang yang memang sudah bersifat jahat dan zalim, apa saja yang mungkin dijadikannya kedok untuk menyembunyikan kezalimannya, tentu digunakannya. Hal ini berlaku baik di timur maupun barat, agama Islam, kristen, budha dan bisa juga apa yang dinamakan orang demokrasi, aristokrasi historical materialisme Karl Marx dll<sup>47</sup>.

Selanjutnya Ir. Soekarno mengatakan: *"Apa alasannya Turki memisahkan agama dengan Negara?"* ia mengemukakan dengan alasan untuk membela pemikiran yang terjadi di Turki, antara lain: *"Disuatu negara demokrasi, yang ada dewan perwakilan rakyatnya, sebenarnya mewakili rakyat, dapat dikatakan bahwa mereka mewakili keagamaannya dalam tiap tindakan negara dan dalam tiap sidang yang dipakai di dalam negara itu, walaupun di Negara tersebut agama dipisahkan dari negara, asal sebagian besar dari anggota-anggota parlemen, politiknya politik agama, maka semua putusan-putusan parlemen itu dengan sendirinya akan berisi fatwa-fatwa agama pula. Asal sebagian besar dari anggota-anggota parlemen itu politiknya politik Islam, maka tidak akan berjalanlah satu produk yang tidak bersifat Islam"*.

M Natsir menanggapi dengan mengatakan, *"Kalau kebetulan sebagian besar dari anggota parlemen itu islamnya seperti Kemal Pasya, yakni yang tidak menghargai peraturan-peraturan agama sepeserpun. Apakah yang akan terjadi? Dan bagaimana pula kalau sebagian besar, atau 100% dari anggota-anggota*

*parlemen itu politiknya bukan politik Islam walaupun bibirnya mengatakan bahwa mereka 'beragama' juga, apakah yang akan terjadi?"*.

Mungkin ada orang akan berkata: *"Bukankah Islam itu bersifat demokratis?"*. Natsir mengatakan bahwa Islam memang bersifat "demokratis" dengan arti bahwa Islam itu anti *istibdad*, anti *absolutisme* anti sewenang-wenang. Akan tetapi tidak berarti bahwa dalam pemerintahan Islam itu semua urusan diserahkan kepada keputusan Musyawarah Majelis Syura. Dalam parlemen negara Islam, tidaklah akan dipermusyawarkan terlebih dulu, apakah yang harus menjadi dasar bagi pemerintahan dan tidaklah mesti ditunggu keputusan parlemen terlebih dulu, apakah perlu diadakan pembasmian meminum arak atau tidak. Begitu pula untuk pembasmian judi dan pelacuran, pemberantasan *khurafat* dan kemusyrikan atau tidak. Itu semua bukan hak msyawarah parlemen. Yang mungkin diperbincangkan ialah cara-cara untuk menjalankan semua hukum itu. Adapun prinsip dan kaedahnya sudah tetap, tidak akan berubah lagi.

Diakhir rangkaian tulisan M. Natsir tersebut, beliau mengatakan, *"Dalam urusan persatuan dan pemisahan agama dari negara ini, kita orang Islam tidak berkiblat kepada Turki, tidak kepada Mesir dan juga tidak berkiblat ke-negara manapun juga. Kita orang Islam tidak memakai sejarah sebagai ukuran dan tidak hendak berhakim kepada riwayat. Urusan ini bukan urusan "ramalan" yang harus dipersaksikan betul atau melesetnya oleh riwayat di masa depan"*<sup>48</sup>.

<sup>47</sup> Ajib Rosidi, *M. Natsir Sebuah Biografi*, hlm. 307

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 307

### Penutup

Membaca gagasan-gagasan Soekarno dan Muhammad Natsir di atas memberikan kesan adanya pertentangan gagasan tajam di antara kedua tokoh tersebut. Soekarno, berdasarkan analisis perkembangan sejarah, berkesimpulan bahwa agama dan negara tidak dapat disatukan, keduanya harus dipisahkan. Sementara, Natsir menilai bahwa agama dan negara dapat dan harus disatukan, sebab Islam tidak seperti agama-agama lainnya, merupakan agama yang serba mencakup (komprehensif). Persoalan kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian dari Islam dan telah diatur dalam Islam.

### Daftar Pustaka

- Abdurhaman Misno, *Menjadi Muslim Mandiri*, Jakarta, Amzah, 2010
- Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Tentang Paradigma dan Sistem Islam*, Jakarta GIP, 2004
- Anwar Harjono, *Pemikiran dan perjuangan Mohammad Natsir*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Dwi Purwoko, *Negara Islam*, Depok: PT. Permata Artistika Kreasi, 2001.
- DP. Sati Alimin, *M.Natsir versus Soekarno*, Padang: Jajasan Pendidikan Islam Padang, 1968.
- M. Natsir, *Capita Selecta 1*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Adian Husaini, *Indonesia Masa Depan Perspektif Peradaban Islam*, Orasi Ilmiah dalam acara Tasyakkur gelar “Doktor” Adaian Husaini oleh INSISTS di Aula Masjid Al-Furqan Dewan Da’wah, 18 April 2009
- Ajib Rosidi, *M. Natsir Sebuah Biografi*, Jakarta: Grimukti Pasaka, 1990. hlm. 256
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Ahmad Shalaby, *Masyarakat Islam*, Yogyakarta: tanpa penerbit, 1957.
- Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfury, *Ar-Rahiqul Maktum, Bahtsun Fis-Sirah An-Nabawiyah Ala Shahibiha Afdhalish-Shalati Was-Salam*, Beirut: Muassasah Arrisalah, 1999
- Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthy, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Rabbani Press, 2001.
- HM Shalahuddin Sanusi, *Pembangunan Masyarakat Masjid; Format Pembangunan Berparadigma Surgawi*, Sukabumi: Lembaga Pembinaan 'Imaratul Masjid, 2003.
- Ahzami Samiun Jazuli, *Hijra dalam Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2000.
- Yusuf Abdullah Puar, *M. Natsir 70 tahun*, Jakarta: Pustaka Antara, 1978
- <http://id.wikipedia.org/wiki/>